

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

Anies Gagal Lepas Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Merek Anker, Politisi PKS Kembali Suarakan

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta kembali mendorong pemerintah daerah untuk melepas kepemilikan [saham](#) bir di [PT Delta Djakarta](#), Tbk.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta memiliki [saham](#) di perusahaan tersebut sebesar 210,20 juta lembar ekuivalen 26,25 persen, sedangkan sisanya milik swasta dan masyarakat umum.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, [Ade Suherman](#) mengaku sudah menyuarakan hal itu saat rapat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPDB) DKI Jakarta.

Rapat yang digelar di Grand Cempaka Resort and Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari Senin (18/11/2024) sampai Rabu (20/11/2024) ini, diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama para direksi BUMD, Ade menyoroti pentingnya Pemprov DKI melepas [saham](#) di PT Delta Jakarta, produsen bir dan minuman beralkohol merek [Anker](#). Kepemilikan [saham](#) di [PT Delta Djakarta](#) sudah menjadi agenda keumatan, bahkan di masa Gubernur [Anies](#) Baswedan telah disuarakan.

"Namun sampai sekarang belum terealisasi," ujar [Ade Suherman](#) yang juga menjadi Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Ade menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini agar aset Pemprov DKI digunakan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat Jakarta.

Dia juga menekankan pendapatan perseroan harus berfokus pada keberkahan dan menjunjung nilai moral dalam prosesnya.

"Sekali lagi kami mohon agar bisa diusulkan oleh pimpinan, dan oleh kita semua agar bisa direalisasikan dan masyarakat juga menjadi tenang," tandas Ade.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, [Anies](#) Baswedan berkeinginan melepas [saham PT Delta Djakarta](#), namun mendapat penolakan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat itu.

Politikus PDIP itu kemudian menyarankan Anies agar menggunakan hak diskresinya menjual saham tersebut tanpa melibatkan DPRD.

"Gubernur punya diskresi kok, di zaman pemerintahan sebelumnya juga ada yang begitu dengan diskresi dia sendiri. Silakan saja dilakukan, tapi saya nggak ikut-ikutan," kata Prasetyo pada 17 Maret 2021 silam. Prasetyo keukeuh tidak akan menjual [saham](#) di Delta, meski nantinya mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung penjualan [saham](#) itu.

"Saya kan bisa beda pendapat, silakan saja putuskan," ujar Prasetyo.

Menurut dia, [Anies](#) sebetulnya dapat menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah pusat.

Soalnya saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki DKI didapat secara cuma-cuma saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 1970 silam.

Saat itu, pemerintah berupaya memiliki [saham](#) tersebut untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

“Ada kejadian PT Bir Bintang, pada saat itu pemerintah tidak bisa masuk mendapatkan [saham](#). Untuk apa? Untuk mengontrol sejauh mana bir bintang ini dipasarkan di masyarakat, itu harus dikontrol,” jelasnya.

“Lalu datanglah (dibentuk) itu [PT Delta Djakarta](#) di tahun 1970 dan diserahkan kepada Pak Ali Sadikin tanpa membeli [saham](#). Permasalahannya adalah ini bukan punya pemda, tapi dari pemerintah Belanda diserahkan kepada pemerintah pusat lalu diserahkan ke pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain itu, Prasetyo khawatir bila [saham](#) itu dijual, harganya tiba-tiba melonjak tinggi. Dari yang misalnya Rp 1 triliun, lalu ketika [saham](#) itu dijual naik menjadi Rp 4 triliun, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Terus yang mau tanggung jawab saya? Saya harus masuk sel (penjara)? Pak silakan saja jual, saya nggak ikut-ikutan nggak ada tanda tangan pulpen hijau dari saya ini. Kalau Gubernur mau jual silakan, cuma aturan harus dilewati,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengaku telah mendapatkan usulan dari Gubernur DKI Jakarta [Anies](#) Baswedan soal rencana penjualan [saham](#) Delta. Namun Prasetyo tidak menindaklanjuti usulan tersebut karena tidak disertai kajian mendalam.

“(Surat) belum saya jawab, karena apa? Tidak ada alasan yang masuk di akal. Sekali lagi saya bukan bela miras lho, tapi ini nggak rasional,” imbuhnya.